**Optimalisasi Peran Pengawas Sebagai Evaluator Kurikulum**

**(Studi Kasus di MAN Trenggalek)**

**Kusmalik**

Pengawas Kementerian Agama Trenggalek

**Abstract**

*The curriculum is a core dimension of education determine the style and color of the process and outcomes of education. To be able to design and implement a good curriculum, the necessary synergy of all components of education. Teachers and supervisors are the main actors in the context of curriculum evaluation. Optimizing the role of each through a variety of efforts to increase the competence and empowerment must be done. In addition, the synergy between the two through an atmosphere of mutual respect and provide support to one another becomes important to be able to produce a good curriculum design and educational outcomes as expected by all stakeholders of the education agency.*

**Pendahuluan**

Pendidikan diselenggarakan untuk mempersiapkan manusia (generasi muda) agar mampu hidup menjawab problem kehidupan dan tantangan zamannya. Melalui pendidikan diharapkan seluruh potensi kemanusiaan akan dapat terkembangkan, sehingga akan lahir “manusia dewasa, manusia seutuhnya, insan kamil dan sebagainya, sesuai dengan konsep tujuan pendidikan yang rumuskan oleh masing-masing. Oleh karenanya proses pendidikan sering disebut dengan *humanizing of human being* yakni proses memanusiakan manusia. Karena secara filosofis manusia sejati adalah manusia yang seluruh dimensinya (jasad, aqal dan ruhaniyahnya) berkembang secara maksimal dan seimbang.

Pendidikan adalah pranata atau institusi yang diselenggarakan untuk mempersiapkan manusia dalam rangka melahirkan manusia yang mampu menjalankan tugas-tugas kemanusiaan yang diembannya. Pendidikan juga merupakan pranata yang mempersiapkan manusia untuk mampu menjawab tantangan kehidupan manusia. Untuk itu, maka pendidikan –kurikulum pendidikan- harus didesain sedemikian rupa sehingga mampu mengakomodir berbagai tuntutan dan kebutuhan yang diperlukan oleh manusia (generasi muda) dalam menyongsong dan menjawab problem zamanya. Penyelenggaraan pendidikan secara ideal harus *match* dengan kebutuhan manusia baik secara ideal maupun praktis.[[1]](#footnote-2)

Dimensi penting yang sangat menentukan dalam merumuskan konsep pendidikan serta bagaimana konsep itu diimplementasi adalah kurikulum. Kurikulum pendidikan merupakan dimensi inti dari pendidikan. Sebagaimana diungkapkan oleh Syaodih bahwa kurikulum memegang kedudukan kunci dalam pendidikan. Kurikulum menjadi penentu arah, isi dari proses pendidikan, yang pada akhirnya menentukan macam dan kualifikasi lulusan suatu lembaga pendidikan.[[2]](#footnote-3) Wajah pendidikan suatu masyarakat atau bangsa sangat ditentukan oleh bagaimana kurikulum yang didesain dan diimplementasikan dalam pengelolaan pendidikan. Oleh karenanya penyusunan desain kurikulum menjadi sangat strategis dalam menentukan corak dan warna pendidikan. Salah satu faktor lahirnya lembaga pendidikan yang efektif dan mampu menarik perhatian masyarakat ditentukan oleh kurikulum yang jelas dan visioner. Sebaliknya kerancuan penyelenggaraan pendidikan juga disebabkan oleh kerancuan dalam penyusunan kurikulum.

Kurikulum merupakan komponen sistem pendidikan yang rentan terhadap perubahan. Paling tidak ada tiga faktor yang membuat kurikulum harus selalu dirubah atau diperbaharui. *Pertama*, karena adanya perubahan filosofi tentang manusia dan pendidikan, khususnya mengenai hakikat kebutuhan peserta didik terhadap pendidikan/pembelajaran. *Kedua*, karena cepatnya perkembangan ilmu dan teknologi, sehingga *subject matter* yang harus disampaikan kepada peserta didik pun semakin banyak dan beragam. *Ketiga*, adanya perubahan masyarakat, baik secara sosial, politik, ekonomi, maupun daya dukung lingkungan alam, baik pada tingkat lokal maupun global.

Karena adanya faktor-faktor tersebut, maka salah satu kriteria baik buruknya sebuah kurikulum bisa dilihat pada fleksibilitas dan adaptabilitasnya terhadap perubahan. Selain itu, baik atau buruknya kurikulum juga dilihat dari segi kemampuan mengakomodasikan isu-isu atau muatan lokal dan isu-isu global. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa pendidikan harus mampu mengantarkan peserta didik untuk hidup pada zaman mereka, serta memiliki wawasan global dan mampu berbuat sesuai dengan kebutuhan lokal.

Begitu pentingnya kurikulum bagi pendidikan, maka penyusunan kurikulum harus dilakukan dengan sangat cermat, memperhatikan segala pertimbangan dan prinsip-prinsip dalam penyusunan kurikulum. Kurikulum bukan bidang yang stagnan. Akan tetapi kurikulum merupakan bidang yang dinamis dan terbuka. Oleh karenanya kurikulum harus selalu dikembangkan seiring dengan dinamika yang terjadi dalam masyarakat. Kurikulum yang dipergunakan dalam proses pendidikan dituntut untuk selalu diadakan evaluasi dan perbaikan seiring dengan tuntutan dan dinamika perubahan di masyarakat.

Evaluasi kurikulum sebagai suatu proses peninjauan dan perbaikan kurikulum memerlukan perhatian dari seluruh pihak yang terlibat dalam proses pendidikan. Pada institusi pendidikan beberapa pihak yang bertanggungjawab terhadap tugas evaluasi dan pengembangan kurikulum antara lain guru, kepala sekolah dan pengawas. Secara ideal, evaluasi dan pengembangan kurikulum tentusaja harus melibatkan seluruh stakeholders lembaga pendidikan. Mereka semua bekerjasama dan bersinergi untuk merumuskan, mengevaluasi dan melakukan perbaikan terhadap kurikulum pendidikan.

Guru adalah orang yang paling dekat dengan kurikulum. Desain, implementasi pengembangan dan evaluasi kurikulum adalah bidang-bidang yang harus dikuasai dan dilaksanakan oleh guru. Selain bertugas sebagai pendidik, tugas dan fungsi guru adalah sebagai penyusun dan pengembang kurikulum. Posisi strategis guru terkait dengan desain dan implementasi kurikulum belum diikuti dengan kompetensi yang memadai dalam menyusun desain dan pengembangan kurikulum. Dalam konteks inilah, maka kehadiran supervisor menjadi penting.

Supervisor tidak hanya memberikan layanan dan pengawasan terhadap proses pembelajaran yang dilaksanakan guru (supervise akademik) dan dimensi administrative (supervise manajerial). Tugas supervisor (pengawas) sebagaimana yang dapat dipahami dalam konsep supervisi atau kepengawasan itu sendiri memiliki dimensi yang luas.[[3]](#footnote-4) Supervisor juga harus memberikan layanan kepada sekolah dan utamanya para guru untuk meningkatkan kemampuannya dalam konteks pengembangan kurikulum. Sebagai pembina sekolah, pengawas satuan pedidikan tentu harus menguasai memahami kebijakan-kebijakan yang terkait dengan bagaimana mendesain, mengimplementasikan serta meninjau serta mengevaluasi kurikulum.

Kondisi empiris di lapangan justru memperlihatkan bahwa tugas penting ini tidak dapat berjalan secara optimal. Beberapa faktor yang menjadi sebab antara lain 1) Proses rekrutmen tenaga pengawas yang bermasalah sehingga pengawas tidak memiliki kualifikasi sebagaimana yang dipersyaratkan. 2) Pengawas tidak memiliki kompetensi yang harus dikuasai.[[4]](#footnote-5) Melalui tulisan ini, penulis ingin mengkaji bagaimana peran supervisor dalam konteks evaluasi dan pengembangan kurikulum ini dapat dimaksimalkan dengan mengadakan studi lapangan secara langsung.

**Metode Penelitian**

Melihat makna yang tersirat dari judul dan permasalahan yang dikaji, penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang tidak mengadakan penghitungan data secara kuantitatif,[[5]](#footnote-6) dengan paradigma naturalistik atau interpretif. Data dikumpulkan dari latar yang alami (*natural setting*) sebagai sumber data langsung. Paradigma naturalistik digunakan karena memungkinkan peneliti menemukan pemaknaan (*meaning*) dari setiap fenomena sehingga diharapkan dapat menemukan *local wisdom* (kearifan local), *traditional wisdom* (kearifan tradisi), *moral value* (emik, etik, dan noetik)[[6]](#footnote-7) serta teori-teori dari subjek yang diteliti. Pemaknaan terhadap data secara mendalam dan mampu mengembangkan teori hanya dapat dilakukan apabila diperoleh fakta yang cukup detail dan dapat disinkronkan dengan teori yang sudah ada.

Rancangan penelitian ini menggunakan rancangan studi kasus, yaitu berusaha mendeskripsikan suatu latar, objek atau peristiwa tertentu secara rinci dan mendalam. Studi kasus adalah penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif mengenai unit sosial tertentu, yang meliputi individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.[[7]](#footnote-8) Penelitian ini akan menghasilkan informasi yang detail yang mungkin tidak bisa didapatkan pada jenis penelitian lain. Penelitian ini berlokasi di MANTrenggalek. Jadi peneliti melakukan penelitian di MAN Trenggalek. Hal ini dikarenakan pengawas MAN Trenggalek cukup profesional maka cukup tepat untuk menguraikan optimalisasi evaluasi kurikulum. Makanya, peneliti ingin membuktikan hal tersebut.

Memperhatikan jenis penelitian tersebut, maka sumber data primer dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan pengawas*.* Pemilihan sumber data ini berdasarkan asumsi bahwa merekalah yang terlibat dalam kegiatan proses pengembangan penelitian tindakan dan pengawasan secara langsung. Adapun sumber data sekunder adalah dokumen atau bahan tertulis atau bahan kepustakaan, yakni buku-buku, artikel, jurnal ilmiah, dan koran yang membahas masalah-masalah yang relevan dengan penelitian ini. Sumber data sekunder lain adalah dokumentasi berupa foto, misalnya foto-foto kegiatan, segala aktifitas maupun sarana dan prasarana yang dapat memberikan gambaran yang nyata pada aspek-aspek yang di teliti, misalnya sekolah, ruang guru, dan lain-lain sebagai tempat dilaksanakannya aktifitas optimalisasi evaluasi kurikulumtersebut.

Data penelitian akan dikumpulkan yang *pertama*, melalui teknik observasi, yaitu dengan mengunjungi pengawas dan mengamati apa yang dilakukannya. *Kedua*, dikumpulkan melalui teknik wawancara, yaitu dengan jalan komunikasi langsung dan melakukan tanya jawab kepada guru MAN untuk memperdalam informasi yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang lainnya.

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis SWOT yaitu untuk mengurai permasalahan dan mencari solusi pemecahan. Pengecekan keabsahan data (*trustworthiness*) dalam penelitian ini memakai pendapat Lincoln dan Guba bahwa pelaksanaan pengecekan keabsahan data didasarkan pada empat kriteria yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmability*).[[8]](#footnote-9)

**Pembahasan**

**Konsep Dasar Kurikulum**

Pada tataran praktis, kurikulum dapat dimaknai kedalam tiga kategori; yaitu kurikulum sebagai sejumlah mata pelajaran, kurikulum sebagai pengalaman belajar dan kurikulum sebagai perencanaan program belajar.[[9]](#footnote-10)Dalam kajian tentang kurikulum, terdapat banyak definisi kurikulum yang dirumuskan oleh para ahli. Masing-masing mendefinisikan sesuai dengan perspektif dan konteks, sehingga muncul beragam definisi kurikulum, diantaranya:

1. Arthur J. Lewis dkk mendefinisikan Kurikulum adalah sebagai sebuah perencanaan untuk memperbaiki seperangkat pembelajaran untuk seseorang agar menjadi terdidik.[[10]](#footnote-11)
2. Menurut Ronald C. Doll, Kurikulum sekolah adalah konten dan proses formal maupun non formal di mana pebelajar memperoleh pengetahuan dan pemahaman, perkembangan skil, perubahan tingkah laku, apresiasi, dan nilai-nilai di bawah bantuan sekolah.
3. Sementara Danniel Tanner and Laurel N. Tanner Kurikulum adalah rekonstruksi dari pengetahuan dan pengalaman secara sistematik yang dikembangkan sekolah (atau perguruan tinggi), agar dapat pebelajar meningkatkan pengetahuan dan pengalamannnya.[[11]](#footnote-12)
4. Sedangkan menurut Oemar Hamalik, kurikulum diartikan sebagai program pendidikan yang disediakan oleh lembaga pendidikan bagi siswa, sehingga siswa melakukan berbagai kegiatan belajar sehingga mendorong pertumbuhan dan perkembanganya sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.[[12]](#footnote-13)

 Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa kurikulum adalah seperangkat perencanaan pengajaran yang sistematik yang berisi pernyataan tujuan, organisasi konten, organisasi pengalaman belajar, program pelayanan, pola belajar mengajar, dan program evaluasi agar pebelajar dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta perubahan tingkah lakuyang menjadi tujuan dari proses pendidikan.

Dari pemahaman ini yang harus diingat adalah bahwa pendidikan dilaksanakan dalam suasana yang dinamis. Kurikulum pendidikan harus disusun sedemikian rupa dengan memperhatikan dinamika yang terjadi di masyarakat. Ketika masyarakat mengalami perubahan, maka perubahan kurikulumpun menjadi keniscayaan. Perubahan kurikulum yang dilakukan sebenarnya didasarkan pada kondisi riil masyarakat yang majemuk, sehingga ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dapat didayagunakan untuk mempengaruhi pola dan sikap serta gaya hidup masyarakat guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya.[[13]](#footnote-14)

Proses perubahan kurikulum tentu saja tidak boleh dilakukan dengan serampangan. Proses ini harus dilakukan dengan cermat melalui tahapan yang sistematis dengan mempertimbangkan berbagai hal. Salah satu langkah penting dalam proses perubahan dan pengembangan kurikulum ini adalah tahap evaluasi. Perubahan kurikulum tidak sekedar memenuhi keinginan dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk merubah. Tetapi harus dilakukan berdasarkan kajian ilmiah yang matang melalui analisis yang cermat dan komprehenship. Evaluasi kurikulum merupakan mekanisme yang harus dilembagakan untuk menjaga agar kurikulum pendidikan memiliki daya suai yang tinggi sehingga pendidikan yang dilaksanakan mampu menjawab tuntutan kehidupan masyarakat.

Evaluasi kurikulum adalah suatu aktivitas ilmiah yang memiliki keterkaitan erat dengan proses pengembangan kurikulum. Kurikulum tanpa evaluasi tidak akan mendapatkan hasil maksimal baik dalam proses konstruksi kurikulum maupun dalam proses pelaksanaannya.[[14]](#footnote-15) Evaluasi dan pengembangan kurikulum meski keduanya adalah dua proses yang berbeda, namun dalam konteks kajian ini keduanya ditampilkan menjadi sebuah proses yang selalu beriringan dan terkait. Evaluasi dilakukan di samping untuk menilai keberhasilan implementasi kurikulum, juga yang lebih penting adalah evaluasi dilakukan sebagai pertimbangan dalam menyusun desain pengembangan kurikulum. Sebaliknya pengembangan kurikulum tidak boleh dilakukan tanpa dilakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap kurikulum yang sudah berjalan.

Secara definitif terdapat banyak definisi tentang evaluasi kurikulum yang disebabkan oleh perbedaan latar belakang, filosofi dan ideologi, dan sebagainya. Tyler sebagaimana dikutip oleh Hamid hasan mendefinisikan evaluasi kurikulum sebagai upaya untuk menentukan tingkat perubahan yang terjadi pada hasil belajar (behavior). Sementara tokoh lain; Orient memandang evaluasi kurikulum sebagai memberikan pertimbangan. Sedangkan Meyer menjelaskan bahwa evaluasi merupakan suatu usaha untuk memahami apa yang terjadi dalam pelaksanaan dan dampak dari kurikulum.[[15]](#footnote-16)

Dari banyak definisi tentang evaluasi kurikulum dapat dipahami bahwa evaluasi kurikulum merupakan proses ilmiah untuk menilai kurikulum; baik secara teoritis maupun melihat dampak dari implementasinya, yang berfungsi untuk menjadi pertimbangan dalam menyususn perbaikan dan pengembangan kurikulum. Dari sini nampak keterkaitan antara evaluasi dan pengembangan kurikulum.

Dalam setiap kegiatan evaluasi dan pengembangan kurikulum, baik pada level makro maupun mikro, selalu membutuhkan landasan-landasan yang kuat dan didasarkan atas hasil-hasil pemikiran dan penelitian yang mendalam. Hal ini disebabkan bahwa kurikulum itu sendiri pada hakikatnya merupakan rancangan atau program pendidikan. Sebagai suatu rancangan/program tersebut, maka kurikulum ini menempati posisi/kedudukan yang sangat strategis dalam keseluruhan kegiatan pendidikan, dalam arti akan sangat menjadi penentu terhadap proses pelaksanaan dan hasil-hasil yang ingin dicapai oleh pendidikan. Dengan posisi yang penting itu, maka penyusunan dan pengembangan kurikulum tidak bisa dilakukan secara sembarangan, dibutuhkan berbagai landasan/dasar yang kokoh dan kuat.

Landasan evaluasi dan pengembangan kurikulum pada hakikatnya adalah faktor-faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan oleh para pengembang kurikulum, pada saat mengembangkan kurikulum pendidikan. Sebuah bangunan/gedung yang besar tentu membutuhkan landasan atau fondasi yang kuat agar bangunan tersebut dapat berdiri tegak, kokoh dan tahan lama. Apabila bangunan tersebut tidak memiliki fondasi yang kokoh, maka yang cepat ambruk/hancur adalah gedung itu sendiri, tetapi apabila landasan pendidikan/kurikulum yang lemah, tidak kokoh, maka yang dipertaruhkan adalah manusianya (siswa).

Kurikulum dengan berbagai komponennya yang terdiri atas tujuan *(aims, goals, objectives)*, isi/bahan *(content)*, aktivitas belajar *(learning activities)*, dan evaluasi, agar memiliki tingkat relevansi dan fleksibilitas yang tinggi/memadai perlu ditopang oleh berbagai landasan *(foundations)*. Landasan-landasan tersebut yaitu: landasan filosofis sebagai landasan utama, epistemologi (sifat-sifat pengetahuan), masyarakat dan kebudayaan, individu (siswa), dan teori-teori belajar. Berkaitan dengan landasan pengembangan kurikulum ini, Robert S. Zais mengemukakan empat landasan, yaitu: *philosophy and the nature of knowledge, society andculture, the individual,* dan *learning theory.[[16]](#footnote-17)*

Landasan filosofis dimaksudkan pentingnya filsafat dalam membina dan mengembangkan kurikulum pada suatu lembaga pendidikan. Filsafat ini menjadi landasan utama yang melandasi aspek-aspek lainnya. Perumusan tujuan dan isi kurikulum pada dasarnya bergantung pada pertimbangan-pertimbangan filosofis. Pandangan filosofis yang berbeda akan mempengaruhi dan mendorong aplikasi pengembangan kurikulum yang berbeda pula. Berdasarkan landasan filosofis ini ditentukan tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan mata pelajaran, dan tujuan pembelajaran. Landasan psikologis terutama berkaitan dengan psikologi/teori belajar dan psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan diperlukan terutama dalam menentukan isi kurikulum yang diberikan kepada siswa agar tingkat keluasan dan kedalamannya sesuai dengan tarap perkembangan siswa tersebut. Psikologi belajar memberikan kontribusi dalam hal bagaimana kurikulum itu disampaikan kepada siswa dan bagaimana pula siswa harus mempelajarinya, dengan kata lain berkenaan dengan penentuan strategi kurikulum. Landasan sosial-budaya dijadikan sebagai salah satu aspek yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum karena pendidikan selalu mengandung nilai yang harus sesuai dengan nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Di samping itu, keberhasilan suatu pendidikan dipengaruhi oleh lingkungan. kehidupan masyarakat, dengan segala karakteristik dan kekayaan budayanya, menjadi dasar dan acuan bagi pendidikan/kurikulum. Landasan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) diperlukan dalam pengembangan kurikulum sebagai upaya menselaraskan isi kurikulum dengan perkembangan dan kemajuan yang terjadi dalam dunia IPTEK yang menyebabkan pula perkembangan dunia pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain landasan-landasan kurikulum pada umumnya seperti dijelaskan di atas, dalam implementasi kurikulum sekolah pada suatu negara selalu dilandasi juga oleh landasan legal berupa kebijakan-kebijakan pendidikan yang diberlakukan di negara tersebut.

Di Indonesia evaluasi dan pengembangan kurikulum dilandasi oleh system perundang-undangan sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.[[17]](#footnote-18)

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, [[18]](#footnote-19)

c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Standar isi ini mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan 21 tertentu. Termasuk dalam standar isi adalah: kerangka dasar dan struktur kurikulum, Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) setiap mata pelajaran pada setiap semester dari setiap jenis dan jenjang pendidikan dasar dan menengah.

d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Standar Kompetensi Lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.

e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

**Konsep Eksistensi Pengawas**

Pengawas atau supervisor adalah orang yang melaksanakan tugas kepengawasan atau supervisi. Dalam konteks pendidikan pengawas (supervisor) pendidikan adalah salah satu tenaga kependidikan yang bertugas memberikan pengawasan agar tenaga kependidikan lainya (guru, dan personel sekolah lainya) dapat menjalankan tugas sebaik baiknya dalam mencapai tujuan pendidikan.[[19]](#footnote-20) Jabatan pengawas memiliki tugas dan tanggung jawab serta wewenang yang besar untuk melakukan tidak saja pengawasan tetapi juga penilaian dan pembinaan baik pada dimensi administrasi (manajerial) maupun akademik.

Melihat paparan di atas dapat dipahami bahwa peran pengawas begitu strategis dalam system pendidikan. Peran strategis pengawas dalam pendidikan berbanding lurus dengan strategisnya peran kepengawasan dalam pelaksanaan pendidikan. Oleh karenanya eksistensi pengawas dalam system pendidikan nasional Indonesia diatur dalam system peraturan dan perundangan yang mapan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan kekuatan terhadap para pengawas dalam menjalankan tugas dan fungsinya memberikan kotribusi yang optimal bagi tercapainya tujuan pendidikan.

Eksistensi pengawas sekolah dalam system pendidikan nasional Indonesia memiliki posisi yang mantap. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 adalah landasan hukum yang terbaru yang menegaskan keberadaan pejabat fungsional itu. Selain itu, Keputusan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara Nomor 118 Tahun 1996 (disempurnakan dengan keputusan nomor 091/2001)  dan Keputuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 020/U/1998 (disempurnakan dengan keputusan nomor 097/U/2001) merupakan menetapan pengawas sebagai pejabat fungsional yang permanen sampai saat ini.

Sementara itu tugas pengawas dapat dicermati dalam Keputusan Menpan No. 118/1996 tentang tugas dan kewenangan pengawas berikut,

”Pengawas sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan di sekolah dengan melaksanakan **penilaian** dan **pembinaan** dari segi **teknis pendidikan** dan **administrasi** pada satuan pendidikan prasekolah, dasar, dan menengah.”

Inti tugas pokok dan fungsi pengawas sekolah adalah ***menilai*** dan ***membina.*** Subjek yang dinilai adalah teknis pendidikan dan administrasi pendidikan. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.[[20]](#footnote-21) Sedangkan Kepmenpan No. 118/1996, bab I, pasal 1, ayat (8) menyatakan, ”Penilaian adalah penentuan derajat kualitas berdasarkan kriteria (tolok ukur) yang ditetapkan terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah.”Terkait dengan tugas menilai, seorang pengawas sekolah melakukan pengumpulan informasi tentang subjek dan objek kerjanya (teknik pendidikan dan administrasi). Informasi  itu kemudian diolah sedemikian rupa. Hasil olahan informasi itu digunakan  untuk mengukur atau menentukan derajat kualitas subjek. Hasil penilaian tersebut akan menginformasikan kepada pengawas sekolah bahwa teknik pendidikan di satuan pendidikan tertentu telah memenuhi tolok ukur (standar) yang ditetapkan atau sebaliknya. Begitu pula halnya dengan teknik administrasi.

Kepemenpan Nomor 118/1996, Bab I, pasal 1, ayat: (9)    Pembinaan adalah *memberi arahan, bimbingan, contoh*, dan *saran* dalam pelaksanaan pendidikan sekolah. (10)  Memberikan arahan adalah upaya Pengawas Sekolah agar guru dan tenaga lain di sekolah yang diawasi dalam melaksanakan  tugasnya lebih terarah dan mencapai tujuan yang telah dirumuskan. (11)  Memberikan bimbingan adalah upaya Pengawas Sekolah agara guru dan tenaga lain di sekolah yang diawasi mengetahui secara lebih rinci kegiatan yang harus dilaksanakan dan cara melaksanakannya (12)  Memberikan contoh adalah upaya Pengawas Sekolah yang dilaksanakan dengan cara yang bersangkutan bertindak sebagai guru yang melaksanakan proses belajar mengajar/bimbingan untuk materi tertentu di depan kelas/ruangan bimbingan dan kenseling dengan tujuan agar guru yang diawasi dapat mempraktikkan model mengajar/membimbing yang baik. (13)  Memberikan saran adalah upaya pengawas sekolah agar sesuatu proses pendidikan yang dilaksanakan di sekolah lebih baik dari pada hasil yang dicapai sebelumnya atau berupa saran kepada pimpinan untuk menindaklanjuti  pembinaan yang tidak dapat dilaksanakan sendiri.

Sementara itu Ngalim Purwanto menjelaskan beberapa tugas yang harus diemban oleh pengawas dalam konteks kurikulum, yakni:

* 1. Mengorganisasi dan bekerja dengan kelompok guru-guru dalam program revisi kurikulum.
  2. Bekerjasama dengan konsultan kurikulum dalam menganalisis dan mengembangkan kurikulum.
  3. Menulis dan mengembangkan materi kurikulum. [[21]](#footnote-22)

Berdasarkan hal di atas, ada sejumlah kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pengawas sekolah. Secara garis besar ada dua kompetensi yang harus dimiliki, yakni kompetensi menilai dan kompetensi membina. Wawasan pengawas sekolah dalam bidang penilaian sangatlah dibutuhkan. Mulai dari memahami konsep penilaian, jenis penilaian, indikator penilaian, instrumen penilaian, mengolah hasil penlaian, sampai kepada  memanfaatkan hasil penilaian untuk pembinaan, merupakan hal wajib yang harus dikuasai pengawas sekolah. Selain itu, melaksanakan penilaian dengan kiat yang tepat juga merupakan bagian dari komeptensi yang tidak boleh dilupakan. Sehubungan dengan ini, ada empat kelompok tugas pengawas sekolah yaitu: (1) merencanakan penilaian yang dilengkapi dengan instrumennya; (2) melaksanakan penilaian sesuai dengan kaidah-kaidah  penilaian; (3) mengolah hasil penilaian dengan teknik-teknik pengolahan yang ilmiah; dan (4) memanfaatkan hasil penilaian untuk berbagai keperluan.

Pengawas sekolah juga harus memahami konsep pembinaan, jenis-jenis pembinaan, strategi pembinaan, komunikasi dalam membina, hubungan antarpersonal dalam membina, dan sebagainya. berkaitan dengan pembinaan, pengawas sekolah juga harus piawai merencanakan pembinaan, melaksanakan pembinaan, menilai hasil pembinaan, dan menindaklanjuti hasil pembinaan. Dengan kompetensi-kompetensi itu tentu keberadaan pengawas di satuan pendidikan benar-benar diharapkan dan dirindukan.

Berdasarkan hal itu tugas pokok pengawas sekolah dapat dirumuskan selaras dengan ayat 1, pasal 2, Kepmenpan Nomor 118/1996 sebagai beirkut, ”Pengawas Sekolah mempunyai tugas pokok menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah sekolah tertentu baik negeri maupun swasta yang menjadi tanggungjawabnya.”

**Posisi dan Peran Pengawas Dalam Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum**

Terdapat beberapa bidang yang menjadi wilayah kerja professional pengawas, yakni menyusun dan melaksanakan pedoman kegiatan tahunan, memandu pelaksanaan kurikulum, membimbing tenaga teknis, membimbing administrasi, memandu penggunaan dan merawat asset sekolah, membina hubungan kerjasama dengan stakeholders dan penyapaian laporan hasil pelaksanaann tugas.[[22]](#footnote-23)

Dari beberapa bidang tugas pengawas tersebut, memandu pelaksanaan kurikulum merupakan salah satu tugas penting yang harus dilaksanakan oleh pengawas. Memandu pelaksanaan kurikulum memiliki cakupan yang luas termasuk bagaimana menilai desain kurikulum dan implementasinya untuk kepentingan pengembangan kurikulum di sekolah.

Evaluasi kurikulum sesungguhnya merupakan tugas dari seluruh civitas sekolah atau lembaga pendidikan (guru, kepala sekolah, pengawas). Dilihat dari pelaksana evaluasi, terdapat dua jenis evauasi kurikulum 1. Evaluasi internal yakni evaluasi kurikulum yang dilakukan oleh tim pengembang kurikulum,evaluasi internal lebih banyak berkenaan dengan fungsi formatif, berupa penyempurnaan dokumen kurikulum. Laporan yang diberikan berupa masukan untuk perbaikan ketika proses pengembangan kurikulum masih dalam proses. Subyek evaluator kurikulum biasanya diperankan oleh kepala sekolah 2. Evaluasi eksternal, evaluasi yang dilakukan oleh orang yang tidak terlibat dalam tim pengembang kurikulum. Secara khusus evaluator diminta untuk melakukan evaluasi terhadap dokumen, proses atau hasil kurikulum.[[23]](#footnote-24)

Secara ideal evaluasi kurikulum harus dilakukan secara berkala dengan melibatkan stakeholders sekolah atau lembaga pendidikan. Pengawas dalam konteks evaluasi harus menguasai fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Menguasai dan memahami tujuan-tujuan pendidikan secara khusus dan rinci
2. Menguasai dan memiliki norma-norma dan ukuran-ukuran yang akan dipergunakan sebagai kriteria penilaian
3. Menguasai teknik-teknik pengumpulan data untuk memperoleh data yang lengkap, benar dan dapat diolah menurut norma yang ada.
4. Menafsirkan dan menyimpulkan hasil penilaian sehingga mendapatkan gambaran tentang kemungkinan –kemungkinan untuk mengadakan perbaikan.[[24]](#footnote-25)

**Problem Empiris Pengawas Sebagai Evaluator Kurikulum di MAN Trenggalek**

Penelitian ini peneliti lakukan di sebuah lembaga pendidikan Islam yang ada di Trenggalek, yaitu MAN Trenggalek. Di lembaga tersebut peneliti menemukan beberapa problem dari hasil wawancara dengan pengawas yang mengawasi, maupun dari guru-guru di lembaga tersebut.

Pengawas biasanya datang ke madrasah untuk memverivikasi kurikulum, namun di MAN Trenggalek, hal tersebut jarang atau bahkan tidak pernah dilakukan, karena MAN tersebut dianggap sudah mampu melakukan evaluasi sendiri. Hal ini diungkapkan oleh salah satu pengawas yang bertugas mengawasi MAN Trenggalek, ketika peneliti bertanya kepadanya:

Memang idealnya Kami sebagai pengawas melakukan pengawasan untuk mengevaluasi pelaksanaan dan pengembangan kurikulum di MAN Tulungagung 1 tersebut. Namun, karena MAN tersebut sudah Kami anggap sebagai lembaga yang unggul dan punya sumber daya manusia yang profesional, maka pengembangan dan pelaksanaan kurikulumnyapun juga pasti baik.[[25]](#footnote-26)

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Kepala MAN Trenggalek. Dia mengemukakan bahwa “Jarang ada pengawas yang datang ke sini untuk mengevaluasi kurikulum, yang ada mungkin hanya pengawas yang datang ketika ada ulangan semester atau lainnya. Itu saja hanya bertanya tentang pelaksanaan ulangan semester saja.”[[26]](#footnote-27)

Tidak ada pembinaan khusus terhadap Madrasah dari pihak pengawas. Pengawas datang ke Madrasah biasanya walaupun ketika waktu pelaksanaan ulangan semester, hanya bincang-bincang dengan kepala madrasah atau wakasek saja. Hal ini sebagaimana diungkapkan pak Suyoto, dalam ungkapannya sebagai berikut: “…Saya datang ke MAN Trenggalek itu, ketika ujian semester, namun itupun juga hanya bincang-bincang dan mengecek administrasi saja. Buat apa dibina, kalau mereka sudah mampu”[[27]](#footnote-28) Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengawas mempercayakan evaluasi dan pengembangan kurikulum kepada lembaga masing-masing dan kebanyakan mereka hanya mengadakan supervisi secara formalitas saja.

Bahkan ketika validasi KTSP, kebanyakan pengawas menyerahkan instrumen validasi kepada lembaga yang bersangkutan untuk memvalidasi KTSP nya sendiri. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau: “Masalah validasi biasanya saya serahkan pada lembaga tersebut. Saya hanya menandatangani saja.”[[28]](#footnote-29) Berangkat dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa evaluasi kurikulum yang dilakukan tidak serius dan hanya sebatas formalitas saja. Maka dari itu, dapat penulis simpulkan bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagai evaluator kurikulum, pengawas tidak sungguh-sungguh dan tidak serius. Karena kalau memang pengawas tersebut profesional, maka pengawas harus menjalankan tupoksinya dengan baik dan benar, baik sebagai pengembang maupun sebagai evaluator kurikulum.

**Analisis SWOT Kasus di MAN Trenggalek**

Berpijak dari beberapa problema di atas, penulis akan mengadakan analisis SWOT untuk memecahkan masalah itu. Analisis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kekuatan
2. Banyak pengawas yang meningkatkan kompetensinya dengan melalui pendidikan lanjutan, yaitu adanya beasiswa kepengawasan baik dalam kemendiknas maupun kemenag. Hal tersebut mengakibatkan pengawas mampu memahami teori kurikulum khususnya evaluasi kurikulum yang bias diaplikasikan di lapangan.
3. Terjadinya konsentrasi pengawas sesuai dengan PP yang berlaku yaitu satu pengawas membawahi 7 madrasah atau sekolah. Sehingga, dengan hal itu pengawas bias mengenal pribadi guru secara lebih mendalam lagi.
4. Kelemahan
5. Dari kondisi riil di lapangan, terdapat kelemahanya itu terlalu banyaknya cakupan kepengawasan yang dilaksanakan oleh tiap pengawas.
6. Pengawas biasanya hanya berperan sebagai kurir, yaitu bertugas mengantar surat dari kantor ke madrasah. Jadi signifikansi peran pengawas tidak ada.
7. Pengawas datang di madrasah hanya melakukan aspek formalitas saja, yaitu hanya datang, tanpa melakukan pembinaan secara lebihl anjut.
8. Peluang
9. Adanya diklat-diklat yang diadakan bagi para pengawas, yang bias menambah kompetensi pengawas dalam hal pengembangan dan evaluasi kurikulum.
10. Adanya paket instrument validasi terhadap kurikulum yang sudah ditentukan sehingga memudahkan pengawas dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas di bidang kurikulum.
11. Adanya pendidikan kepengawasan untuk meningkatkan professionalism pengawas.
12. Ancaman
13. Pengawas yang terlalu jujur dan ideal dibenci oleh madrasah yang bersangkutan.
14. Hasil dari verifikasi pengawas tidak ada tindak lanjutnya.

**Upaya peningkatan Kapasitas Pengawas Sebuah Tawaran Solusi**

Adanya kesenjangan antara cita dan fakta dalam bidang kepengawasan yang menimbulkan problem harus dicarikan solusi. Posisi pengawas yang strategis dalam konteks pembangunan mutu pendidikan serta kedudukan formalnya yang mantap dengan payung perundangan yang jelas harus diimbangi dengan kapasitas yang memadai. Oleh karenanya upaya-upaya peningkatan kapasitas pengawas harus terus dilakukan agar pengawas mampu memainkan peran secara optimal.

Upaya untuk memperbaiki kinerja pengawas harus dilakukan sejak pada tahap awal yakni melalui perbaikan sistem rekrutmen pengawas. Secara normatif sistem rekrutmen pengawas sudah memiliki acuan yang jelas, misalnya bagaimana kualifikasi seseorang untuk bisa menjadi pengawas. Pemenuhan kualifikasi calon pengawas merupakan langkah awal yang sangat strategis bagi upaya peningkatan kapasitas dan kinerja kepengawasan. Rekrutmen tenaga kepengawasan juga harus memperhatikan standar sebagaimana dikemukakan oleh Veithzal Rifa’i sebagai berikut:

1. Memiliki wawasan kependidikan dan kemampuan mengantisipasi terjadinya perubahan yang mempengaruhi pendidikan
2. Menyadari fungsi kepengawasan sebagai sub-sistem dalam system pendidikan secara komprehensif.
3. Memahami berbagai tehnik kepengawasan
4. Memiliki ketrampilan dalam mengkomunikasikan ide dan gagasan baik secara verbal maupun non verbal
5. Memahami mekanisme dan prosedur penyelesaian masalah secara utuh
6. Memiliki ketrampilan yang dapat memanfaatkan SDM dan sumber daya fasilitas yang ada untuk mengefektifkan tugas di lapangan
7. Memiliki kekuatan integritas pribadi yang utuh
8. Mampu bekerjasama secara simpatik dan empati[[29]](#footnote-30)

Upaya lain adalah melalui pengembangan profesi pengawas sekolah yakni kegiatan yang dilakukan pengawas sekolah/Madrasah dalam rangka pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan untuk peningkatan mutu profesionalisme sebagai pengawas sekolah/Madrasah maupun dalam rangka menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi pendidikan, khususnya dalam kegiatan menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan. Pengembangan profesi adalah satu dari empat unsur kinerja pengawas sekolah. Unsur lainnya adalah pendidikan, pengawasan akademik dan manajerial, serta penunjang.

Untuk meningkatkan kompetensi pengawas dalam menjalankan tugas dan fungsinya terutama terkait dengan perannya sebagai evaluator kurikulum, terdapat pola-pola pemberdayaan yang lazim dilakukan. Beberapa bentuk pemberdayaan itu antara lain:

1. Mengikutsertakan pengawasan dalam pendidikan dan pelatihan
2. Mendorong dan memberikan kesempatan kepada pengawas untuk ikut dalam forum seminar dan diskusi
3. Meminta laporan tugas dan kegiatan secara periodik
4. Melakukan pertemuan antara pengawas secara berkala.
5. Perlu dilakukan Koordinasi antara pusat dan daerah mengenai pengawasan pendidikan agar monitoring dan evaluasi serta pembinaan satuan pendidikan terkait dengan standar nasional pendidikan dapat berjalan secara efisien.
6. Mengintesifkan kelompok-kelompok kerja pengawas, karena sekaligus juga akan memudahkan masing-masing individu untuk mengembangkan ide dan berbagi.

**Penutup**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilaksanakan dapat diambil beberapa simpulan sebagai berikut:

Kurikulum adalah dimensi inti dari pendidikan yang menetukan corak dan warna dari proses dan hasil pendidikan. Untuk dapat mendesain dan melaksanakan kurikulum yang baik, maka diperlukan sinergi dari seluruh komponen pendidikan. Guru dan pengawas adalah aktor utama dalam konteks evaluasi kurikulum. Optimalisasi peran masing-masing melalui berbagai upaya peningkatan kompetensi dan pemberdayaan harus dilakukan. Di samping itu sinergi antara keduanya melalui suasana saling menghargai dan memberikan *support* satu sama lain menjadi penting untuk dapat menghasilkan desain kurikulum yang baik, serta hasil pendidikan sebagaimana yang diharapkan oleh seluruh stakeholders lembaga pendidikan.

**Daftar Rujukan**

Arifiatun, *Kontribusi Supervisi Pengawas Sekolah, Kinerja Profesional Kepala Sekolah dan Pengembangan Profesionalisme Guru terhadap Kinerja Profesional Guru di SMA Negeri Kabupaten Jember,* (Tesis), Malang: Universitas Negeri Malang, 2009.

Hamalik, Oemar,*Proses Belajar Mengajar*. Jakarta: PT Bumi Aksara 2005.

Hamalik, Oemar,*Manajemen Pengembangan Kurikulum*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2008

Hasan, Hamid,*Evaluasi Kurikulum.* Bandung : Remaja Rosdakarya, 2009.

Mulyasa, E.,*Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan,* Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2006.

Nasution, *Asas Asas Kurikulum,* Jakarta : Bumi Aksara, 2006.

Neagley, Ross L., Evans, N. Dean, *Handbook for Effective Supervision of Instruction,* Englewood Cliffs-Prentice Hall, Inc. New York, 1980.

Ngalim Purwanto, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, Cet ke-10, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.

Oliva, Peter F.,*Developing The Curriculum 3rd Edition*. New York: Harper Collins  Publishers, 1992.

PP no 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Rivai, Veithzal, Sylviana Murni, *Education Management, Analisis Teori dan Praktik,* Jakarta: Rajawali Press, 2009.

Sanjaya, Wina, *Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi*, Jakarta,Kencana Prenada Media Group, 2006.

Sukmadinata, Nana Saodih,*Pengembangan Kurikulum, Teori dan Praktik*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2007.

Suliadi, Rachmat,*Hubungan Antara Supervisi Pengawas Sekolah, Intensitas Kegiatan MGMP dan Motivasi Berprestasi Guru dengan Profesionalisme Guru SMA Negeri di Kota Malang,* (Tesis), Malang: Universitas Negeri Malang, 2009.

Syukri, *Hubungan Antara Peran Supervisi Pengawas Pendidikan Agama Islam Dengan Kualitas Pembelajaran Guru Mata Pelajaran Agama Islam Di Kota Mataram*, dalam Jurnal Penelitian Keislaman, Vol 2 Nomer 2 Juni 2006.

Tyler, Ralph W.,*Basic Principles of Curriculum and Instruction,* London: Lowe and Brydone Printers Ltd, 1973.

UU Nomer 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional

Zais, Robert S., *Development Curriculum Principles and Foundations*, New   York: Harver & Row Publiseher, 1976.

1. Pada era orde baru pernah digulirkan konsep *link and match,* dalam penyelenggaraan pendidikan nasional yakni gagasan yang menekankan keterkaitan dan kesesuaian antara pendidikan utamanya kurikulum pendidikan dengan kebutuhan prkatis siswa dan tuntutan perkembangan teknologi. [↑](#footnote-ref-2)
2. Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), v [↑](#footnote-ref-3)
3. Salah satu definisi supervisi yang dikemukakan oleh para ahli adalah “ aktifitas menentukan kondisi-kondisi dan syarat syarat yang esensial yang akan menjamin tercapainya tujuan pendidikan. Ngalim Purwanto, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, Cet ke-10 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 76 [↑](#footnote-ref-4)
4. Lihat Permenag nomor 2 tahun 2012 tentang Pengawas madrasah dan Pengawas pendidikan Agama Islam pada sekolah pasal 6 dan 7 tentang kualifikasi dan kompetensi pengawas. [↑](#footnote-ref-5)
5. Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif,*(Bandung: Remaja Rosda Karya, 1990), 2 [↑](#footnote-ref-6)
6. Emik bisa diartikan sebagai moral values individual atau personal values, etik adalah ekstrensik dan universal values, noetik adalah moral values kolektif [↑](#footnote-ref-7)
7. Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan,* (Surabaya : SIC,2001), 24. [↑](#footnote-ref-8)
8. YS. Lincoln and Egon G. Guba, *Naturalistic Inquiry,* (Beverly Hill, Caifornia: Sage Publications, 1985),289-331 [↑](#footnote-ref-9)
9. Wina Sanjaya, *Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 2. [↑](#footnote-ref-10)
10. Oliva, Peter F. *Developing The Curriculum 3rd Edition* (New York: Harper Collins  Publishers, 1992), 6 [↑](#footnote-ref-11)
11. *Ibid., 7* [↑](#footnote-ref-12)
12. Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 10. [↑](#footnote-ref-13)
13. E. Mulyasa, *Kurikulum Yang Disempurnakan Pengembangan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar,* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2006 ), 16. [↑](#footnote-ref-14)
14. Hamid Hasan, *Evaluasi Kurikulum,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), v [↑](#footnote-ref-15)
15. *Ibid*., 38 [↑](#footnote-ref-16)
16. Robert S Zais, *Development Curriculum Principles and Foundations*, (New   York: Harver & Row Publiseher. 1976). [↑](#footnote-ref-17)
17. Lihat UU nomer 20 tahun 2003, Pasal 1 ayat (19); Pasal 35 ayat (2); Pasal 36 ayat (1), (2), (3), (4); Pasal 37 ayat (1), (2), (3); Pasal 38 ayat (1), (2). [↑](#footnote-ref-18)
18. Lihat PP no 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan [↑](#footnote-ref-19)
19. Veithzal Rivai dan Sylviana Murni, *Education Management: Analisis Teori dan Praktik, (*Jakarta: Rajawali Press, 2009), 817 [↑](#footnote-ref-20)
20. Lihat PP 19/2005 tentang *standar nasional pendidikan*, bab I, pasal 1, ayat (17) [↑](#footnote-ref-21)
21. Purwanto, *Administrasi dan Supervisi pendidikan…,* 88 [↑](#footnote-ref-22)
22. Rivai dan Murni, *Education Management…*, 850-857 [↑](#footnote-ref-23)
23. Hamid Hasan, . *Evaluasi Kurikulum.* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2009), 149-150 [↑](#footnote-ref-24)
24. Ngalim Purwanto, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan,* (Bandung Remaja Rosdakarya, 2010), 87 [↑](#footnote-ref-25)
25. Wawancara dengan Suyoto, tanggal 3 Januari 2016, jam 10.05 [↑](#footnote-ref-26)
26. Wawancara dengan Basuki, tanggal 3 Januari 2016, jam 11.05 [↑](#footnote-ref-27)
27. Wawancara dengan Suyoto, tanggal 3 Januari 2016, jam 10.05 [↑](#footnote-ref-28)
28. Wawancara dengan Suyoto, tanggal 3 Januari 2016, jam 10.05 [↑](#footnote-ref-29)
29. Rivai dan Murni, *Education Management…*. 847 [↑](#footnote-ref-30)